

Judul : Bamsoet Bakal Penuhi Janji ke PDIP
Tanggal : Rabu, 17 Januari 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 5

Bamsoet Bakal Penuhi Janji ke PDIP

Beri Jatah Kursi Pimpinan di DPR

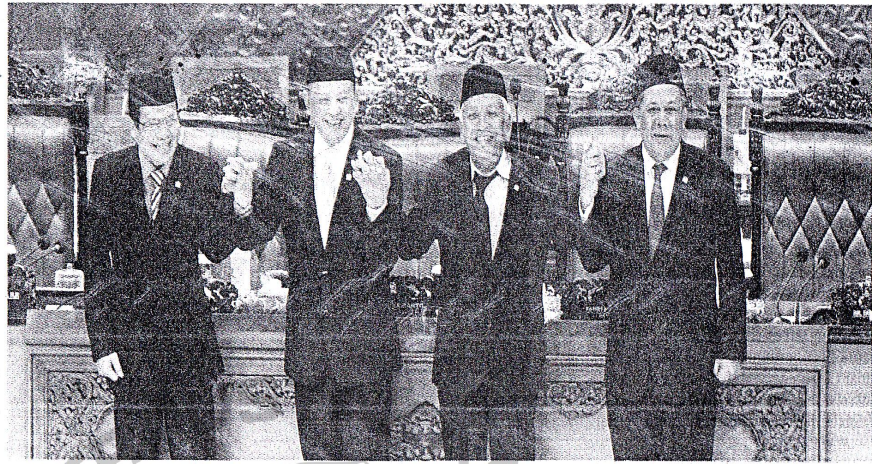
JAKARTA-Ditagh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR RI baru berjanji akan memenuhinya. Partai banteng moncong putih tidak hanya akan mendapat jatah kursi pimpinan DPR RI, akan tetapi pimpinan MPR RI. Namun, dalam pembahasan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra bersikukuh meminta porsi yang sama seperti PDIP.

Ketua DPR Bambang Soesatyo, mengatakan, parlemen telah menyepakati penambahan jumlah kursi pimpinan dewan dalam revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). "Sudah hampir putus, satu di DPR, dua di MPR," ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (16/1).

Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo menuturkan, jatah kursi pimpinan di DPR sudah dipastikan untuk PDIP. Sebagai partai pemenang pemilu, PDIP tidak memiliki wakilnya di kursi pimpinan. Hal serupa juga berlaku di kursi pimpinan MPR. Satu kursi tambahan pimpinan MPR bakal diberikan kepada PDIP. "Satu lagi di MPR ini kami belum tahu. Bergantung perkembangan di Baleg (Badan Legislasi DPR, Red)," ujarnya.

Selain itu, Bamsoet juga memastikan bahwa perubahan UU MD3 hanya diperuntukan untuk penambahan kursi pimpinan dan komposisi pimpinan secara proporsional di periode 2019. Revisi lain adalah soal penambahan personel di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dia memastikan bakal mengomunikasikan dengan seluruh fraksi dan menyelesaikan pada masa sidang kali ini. "Pasti, yang pasti masa sidang ini selesai. Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai kita pakai mekanisme lain," kata dia.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Su-



BERTAMBAH-Ketua DPR RI yang baru Bambang Soesatyo (dua dari kiri) bersama Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah usai dilantik. Senin (15/1).

pratman Andi Agtas menyatakan, pembahasan penambahan pimpinan dalam revisi UU MD3 masih belum final. Dikarenakan PKB juga mendesak meminta jatah kursi pimpinan DPR. "Sementata untuk kursi pimpinan MPR telah disepakati bertambah dua kursi. Satu untuk PDIP dan satu lagi untuk Gerindra," kata politisi Partai Gerindra itu saat dihubungi, Selasa (16/1).

Supratman juga memaparkan, beleid yang akan direvisi yakni Pasal 83 UU MD3. Dalam beleid itu disebutkan bahwa pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Pasal tersebut direvisi untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR. Tujuannya untuk mengakomodasi partai pemilik suara terbanyak di parlemen agar mendapat kursi pimpinan DPR dan MPR. "Pemilik kursi terbanyak hasil pemilu 2014 adalah PDIP. Namun, partai berlambang banteng bermoncong putih itu tidak kebagian jatah kursi DPR karena diisi oleh perwakilan dari fraksi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera," tuturnya.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menuturkan, penambahan jumlah pimpinan DPR dan MPR melalui revisi UU MD3 merupakan

kesepakatan fraksi-fraksi sehingga pimpinan tidak ikut campur di dalamnya. "Hal penting, komitmen menambah satu atau dua harus benar-benar disepakati fraksi-fraksi," kata Agus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (16/1).

Menurut Agus, kesepakatan awal revisi UU MD3 adalah penambahan satu orang Wakil Ketua DPR, namun dalam prosesnya di Baleg DPR RI, banyak poin yang belum disepakati. Dari situ, ternyata ada fraksi yang meminta dua hingga tiga pimpinan DPR dan mengakibatkan proses revisi UU MD3 belum selesai hingga saat ini. "Barangkali dengan semangat yang baru, semua sudah bisa memberikan yang terbaik sehingga mudahan bisa terselesaikan," kata politisi Partai Demokrat itu.

Agus menjelaskan, apabila ada fraksi yang ingin merevisi secara menyeluruh UU MD3 maka harus dilihat apakah revisinya masuk dalam program long term atau short term. Menurut dia kalau revisi menyeluruh maka dimasukkan dalam long term dan barangkali dikembalikan pada posisi seperti UU MD3 yang dulu yaitu, bisa dilakukan secara proporsional. "Kalau short term kemungkinan hanya penambahan satu pimpinan DPR. Namun ini semuanya tergantung dari pembicaraan yang ada di Pansus," imbuhnya.

Dia menilai, penambahan satu pimpinan DPR masih memungkinkan namun kalau lebih dari itu, harus dibicarakan secara rinci dengan pihak-pihak terkait. Karena, perlu pengaturan-pengaturan lebih rinci yang tentunya akan memerlukan pembicaraan yang lebih panjang.

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menyetujui penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR melalui revisi UU MD3. Menurut Zulkifli, PDIP sebagai partai pemenang pemilu seharusnya memiliki kursi pimpinan di DPR dan MPR. "Saya setuju karena dari awal PDI-P itu sebagai pemenang pemilu, pemenang pemilu kok nggak ada di pimpinan itu ya bagaimana ya," ujar Zulkifli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (16/1).

Ia pun berharap, jika revisi UU MD3 selesai, PDIP menunjuk Ahmad Basarah sebagai perwakilan di kursi pimpinan MPR. Namun, Zulkifli menegaskan, penambahan kursi pimpinan harus proporsional. Artinya penambahan kursi tidak harus berlaku untuk seluruh fraksi. "Saya setuju proposional saja jadi nggak berantem terus, sudah proposional saja urutan pemenang dapat ketua berikutnya habis itu ada MPR," ucapnya. (aen)